

Sepanjang tahun 2019 media-media yang ada di Indonesia dipenuhi pemberitaan mengenai RUU KUHP. Isu RUU KUHP memang sedang ramai diperbincangkan terlebih oleh media karena dibahas kembali pada era kepemimpinan Presiden Jokowi periode 2014-2019 dan menjadi polemik. Puncak polemik terjadi pada bulan Agustus-September yang ditandai dengan aksi demonstrasi besar-besaran yang membuat media semakin masif memberitakan mengenai RUU KUHP. Di tengah hirup pikuk pemberitaan RUU KUHP, Tirto.id hadir sebagai salah satu media *online* yang turut memberitakan RUU KUHP. Bahkan Tirto.id sampai membuat kanal khusus untuk topik ini dengan tajuk “RUU KUHP”. Hal ini tidak dilakukan oleh media *online* lainnya yang turut memberitakan RUU KUHP. Tirto.id adalah media yang mengklaim dirinya independen dan bebas dari pengaruh karena pendanaannya mandiri. Penelitian ini ingin melihat bagaimana Tirto.id mengimplementasikan *watchdog journalism* melalui *framing* beritanya sebagai media yang mengklaim independen tersebut. Model analisis framing yang digunakan adalah model Zhongdang Pan dan Gerald Kosicki yang sudah dimodifikasi tanpa mengubah landasan dasarnya. Namun, menggunakan perangkat dan unit lain yang tidak biasa dipakai di penelitian lain tetapi merupakan bagian dari apa yang dikatakan Pan dan Kosicki dalam tulisannya. Berdasarkan analisis pada perangkat sintaksis, skrip, tematik, dan retorik, serta mengaitkan pada aspek *watchdog journalism*, dapat ditemukan bahwa Tirto.id memframing RUU KUHP sebagai produk yang bermasalah dan *watchdog journalism* pada berita-beritanya terimplementasi melalui pemilihan narasumber dan kutipannya serta pemilihan headline dan lead yang menunjukkan kritik serta permasalahan dalam RKUHP juga narasi berita yang menunjukkan bahwa RKUHP merupakan produk bermasalah.

Kata kunci: berita *online*, analisis framing, Pan dan Kosicki, RUU KUHP, *watchdog journalism*, Tirto.id

ABSTRACT

Along 2019 the media in Indonesia were filled with news about the Criminal Code Bill. The issue of the Criminal Code Bill is indeed being heavily discussed by the media because it was discussed again in the era of the Presidency of President Jokowi in the 2014-2019 period and became a polemic. The peak of the polemic occurred in August-September which was marked by massive demonstrations which made the media more massive in reporting about the Criminal Code Bill. In the midst of the hustle and bustle of the reporting of the Criminal Code Bill, Tirto.id was present as one of the online media that take part to reporting the Criminal Code Bill. Tirto.id even made a special channel for this topic with the header "RUU KUHP". This action was not done by other online media that reporting the Criminal Code Bill. Tirto.id is a media that claims to be independent and free from external influence because its funding is by himself. This study wants to see how Tirto.id implements watchdog journalism through its news framing as a media that claims to be independent. The framing analysis model used in this study is the Zhongdang Pan and Gerald Kosicki models that have been modified by researcher without changing the foundation of the model. However, using devices and other units that are not commonly used in other studies but are part of what Pan and Kosicki said in their writings. Based on the analysis of syntax, scripts, thematic, and rhetorical tools, as well as linking to watchdog journalism aspects, it can be found that Tirto.id framed the Criminal Code Bill as a problematic product and watchdog journalism on its news was implemented through the selection of interviewees and quotations as well as the selection of headlines and leads that show criticism and problems in RKUHP as well as news narratives that show that RKUHP is a problematic product.

Keyword: Online news, framing analysis, Pan and Kosicki, Criminal Code Bill, watchdog journalism, Tirto.id